

BAB I

PENDAHULUAN

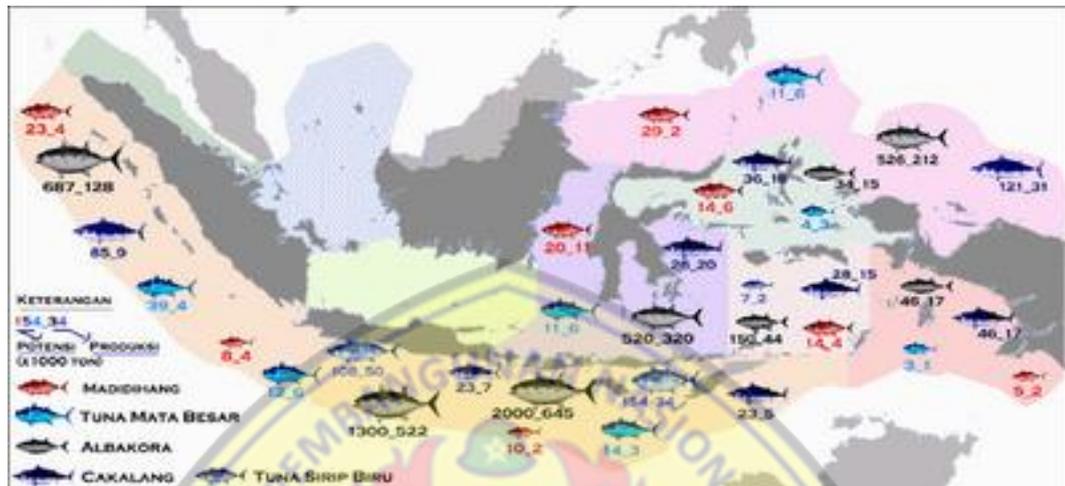
I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah perairan kepulauan berupa garis pantai sepanjang 95.200 kilometer, wilayah laut sebesar 5,8 kilometer bujursangkar lebih luas dibandingkan wilayah darat dan potensi lestari sumber daya ikan laut 6,5 juta ton pertahun atau 8,1 persen potensi ikan laut dunia. Potensi kelautan dan perikanan menjadikan kita memiliki modal dasar pembangunan yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara negara lain. Indonesia menempati posisi ke-3 dunia sebagai industri penangkapan ikan sebesar 5 juta ton/ tahun dan industri perikanan budidaya pada posisi ke-4 dunia sebesar 1,69 ton/ tahun. Selain itu dalam volume ekspor perikanan masih menempati peringkat ke-11. (Djarmiko 2013, hlm. 1)

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2009).

Di Indonesia, perikanan klasifikasi untuk Tuna biasanya mencakup semua tuna besar, dan tuna seperti spesies (marlins, sailfish, dan ikan todak). Skipjack dilaporkan sebagai kelompok yang terpisah "cakalang". Tongkol umumnya termasuk tuna kecil timur, fregat dan peluru tuna dan tuna longtail. Tuna dan distribusi cakalang bidang utama meliputi laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Indonesia di Samudera Hindia, Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, Laut Banda dan Laut Maluku dengan estimasi sumber daya potensial dari 886.600 ton yang mencakup 14% dari sumber daya total kelautan perikanan. Perkembangan industri tuna di Indonesia dimulai pada tahun 1975 dimana pembentukan empat perusahaan perikanan milik negara. Perusahaan-perusahaan ini didirikan dengan misi khusus untuk merintis pengembangan kegiatan

perikanan industri di wilayah tersebut, terutama di daerah terpencil. Tuna rawai nelayan berbasis di Benoa-Bali dan Sabang-Aceh, pancing iklan baris di Bitung-Sulawesi Utara, Sorong-Papua dan Ambon-Maluku (Poernomo 2004, hlm 53-54).



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Gambar 1 Peta Penangkapan Tuna Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan potensi tuna tertinggi di dunia. Tercatat, total produksi tuna mencapai 613.575 ton per tahun dan nilai sebesar 6,3 triliun rupiah per tahun. Dengan didukung wilayah geografis yang mencakup dua samudera kunci untuk perikanan tuna yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia menjadi negara penting bagi perikanan tuna global baik dari sisi sumberdaya, habitat dan juga perdagangan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo mengatakan, perikanan tuna saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Antara lain, menurunnya produktivitas, ukuran yang cenderung mengecil serta daerah penangkapan ikan yang cenderung ke laut lepas. Untuk itu, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries development*) terus ditingkatkan. Diantaranya, untuk potensi ikan tuna, KKP telah melakukan penelitian terhadap populasi tuna. Penelitian ini meliputi reproduksi, genetik tuna, suhu dan kedalaman renang tuna hingga waktu makan ikan tuna. Termasuk

observer terhadap perlakuan saat pendaratan ikan di pelabuhan maupun diatas kapal penangkap Tuna. Penelitian yang dilakukan Loka Penelitian Perikanan Tuna Bena ini adalah bukti komitmen KKP untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya tuna di Samudra Indonesia yang terancam populasinya serta untuk memenuhi tingginya permintaan tuna di pasar dunia (Potensi Tuna Indonesia Tertinggi Di Dunia 2014, hlm. 1).

Dalam dua dekade, industri perikanan longline tumbuh pesat, tercermin dari peningkatan yang signifikan dalam jumlah dan ukuran armada rawai dari 18 kapal pada tahun 1975 menjadi 1.649; beberapa, lebih dari 300 GRT karena meningkatnya permintaan dari tuna segar. Perkembangan pole dan industri pancing itu tidak drastis; dari 70 pole and line unit pada tahun 1980 menjadi 279 dari sekitar 200 GRT pada tahun 2001. Purse seine memancing dimulai pada tahun 1980 dan dikembangkan secara signifikan dalam dua dekade (Potensi Tuna Indonesai Tertinggi Di Dunia 2014, hlm. 54).

Tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging tuna berwarna merah muda sampai merah tua, tuna adalah ikan yang memiliki nilai komersial tinggi (Perbedaan tuna, tongkol dan cakalang 2014, hlm. 1). Provinsi penghasil ikan terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, Jawa Tengah , Sumatera Barat dan Bitong (Indonesia Penghasil Tuna Terbesar ASEAN, Thailand Pengekspor Terbesar 2014, hlm 1), Dan Sulawesi Utara menjadi pengekspor ikan tuna terbesar ke Thailand (Sulut Ekspor Ikan Tuna ke Thailand 2011, hlm 1).

Tuna ini paling digemari karena banyak kandungan gizinya, lebih kenyal dan rasanya lebih enak dibandingkan ikan laut kecil lainnya. Tangkapan ikan tuna Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Setiap tahun Indonesia memproduksi atau menangkap ikan tuna hingga 613.000 ton atau 11% dari potensi produksi ikan tuna dunia. Namun sayangnya, produksi yang besar tidak diimbangi oleh konsumsi dan permintaan di dalam negeri. Sebanyak 70% produksi ikan tuna Indonesia justru diekspor ke Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang, dan Thailand (70% Tuna Indonesia Diekspor ke Thailand Hingga Jepang 2014, hlm. 1). Masyarakat Thailand sangat meminati ikan tuna segar asal Sulawesi Utara karena rasa dan tekstur dagingnya berbeda dengan

daerah lain. Pasar Thailand dikenal sebagai salah satu negara yang sangat ketat dan teliti dalam soal uji kualitas produk. Thailand menjadi pasar ekspor tuna Indonesia sejak tahun 1984, perkembangan Ekspor ikan tuna dari tahun 1984 sampai tahun 2003 mengalami perkembangan kenaikan ekspor yang stabil. Ekspor tersebut sebagian besar dalam bentuk beku, segar dan tuna dalam kaleng.

Tabel 1 Volume Ekspor Tuna Menurut Negara Tujuan, Tahun 2008-2012

Negara Tujuan	Thn 2008/ton	Thn 2009/ton	Thn 2010/ton	Thn 2011/ton	Thn 2012/ton
Thailand	30.041	26.212	11.812	16.780	61.422
Singapore	1.926	1.963	1.421	745	607
Philipines	497	133	355	295	539
Malaysia	1.137	906	318	373	864

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, ekspor ikan tuna ke Thailand dua tahun berturut-turut menurun dari tahun 2008-2010, namun di tahun 2011 terjadi kenaikan yang tidak seberapa dibanding tahun 2009. Selain itu, produk tangkapan tuna itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perdagangan dunia. Syarat-syarat pengamanan perdangan dunia harus dipatuhi sebagai syarat bersaing tingkat dunia (Indonesia dan Negara ASEAN Bahas Pengelolaan Ikan Tuna 2014, hlm 1).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Februari 2015, Muhammad Fathoni, M.Ec., Kasesi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah :

Dari negara tujuan seperti table diatas, Singapore, Philipines dan Malaysia mereka mengimpor tuna asal Indonesia untuk keperluan bahan pokok masyarakat negara tersebut sehari-hari. Berbeda dengan Thailand yang mengimpor tuna asal Indonesia untuk keperluan bahan baku produk kaleng tuna Thailand. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan ekspor tuna ke berbagai Negara termasuk Thailand.

Upaya tersebut diantaranya adalah mengangkat atase di beberapa negara pasar ekspor, khususnya Jepang, Uni Eropa, Thailand, Amerika Serikat. Atase perikanan ini merupakan duta perikanan Indonesia yang memiliki lima fungsi. Pertama, fungsi diplomasi yang menjalankan aktivitas diplomasi untuk mengatasi sejumlah persoalan hambatan perdagangan. Apalagi dengan adanya amanat Undang-Undang (UU) perikanan No. 31/2004 agar kita berperan aktif dalam sumber daya perikanan regional dan Internasional (pasal 10 ayat 2). Kedua, fungsi promosi, yang terus mengupayakan investasi dan mendorong ekspansi pasar perikanan. Ketiga, fungsi informasi, yang terus memberikan informasi-informasi penting tentang kisah sukses negara-negara lain dalam pembangunan perikanan. Keempat, fungsi kolaborasi yang terus menciptakan peluang kerjasama dalam dunia pendidikan dan penelitian perikanan. Kelima, fungsi advokasi yang sering di perlukan, khususnya dalam kasus tenaga kerja perikanan di kapal-kapal asing.

Pemerintah sedang menyiapkan aturan soal kewajiban ekspor hasil perikanan terutama produk ikan tuna. Saat menyatakan kebijakan ini dilakukan untuk mendukung nilai tambah produk ekspor ikan tuna yang saat ini sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Aturannya sedang di buat. Jadi yang akan diekspor ke depan terutama ikan tuna cakalang ini sudah dimasak. Jadi bukan gelondongan. Minimal daging sudah direbus karena selama ini Indonesia mayoritas mengeksport ikan tuna cakalang dalam bentuk bahan mentah. Sedangkan hanya sebagian kecil pelaku usaha yang sudah mengeksport dalam bentuk olahan. Kebijakan eksportasi ikan tuna olahan sebenarnya sudah mulai dilakukan pelaku usaha tahun 2009 hingga 2010 tetapi hanya sedikit kemauan masing-masing pelaku usaha. Tetapi kita sudah berkali-kali untuk mengimbau berinvestasi di bidang perebusan. Ke depan arahnya lebih baik mengeksport tetapi terlebih dahulu diolah di dalam negeri. Pihaknya mencatat, saat ini baru ada 11 industri pengolahan ikan di Indonesia dengan kapasitas yang cukup besar. Dengan demikian, ikan cakalang mentah dapat diolah terlebih dulu di sejumlah pabrikan

tersebut sebelum dikirim ke mancanegara. Pemerintah mulai kendalikan ekspor ikan tuna segera dengan sistem pengalengan untuk tuna albacor, bluefin, dan cakalang. Cara lain adalah kita kendalikan boleh ekspor kalau sudah direbus.

Kaya potensi tapi miskin pengelolaan. Itulah potret industri pengolahan perikanan nasional, tak terkecuali tuna. Betapa tidak, selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen utama tuna dunia. Infofish mencatat nilai ekspor tuna segar Indonesia pada 2004 tertinggi di dunia, mencapai US\$ 106,67 juta. Berkah tersebut masih didukung dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penangkapan tuna yang handal sehingga banyak ?dikaryakan? oleh negara lain. Lihat saja kapal-kapal tuna di Jepang, 62% anak buah kapal (ABK) mereka justru dari Indonesia. Sayang, kelebihan tersebut telah melenakan Indonesia yang malah terjebak menjadi pemasok bahan baku tuna dunia. Ini terbukti dari kinerja ekspor produk tuna olahan yang masih rendah dibandingkan dengan Thailand yang justru bisa dibilang tidak mempunyai sumberdaya tuna. Negeri Gajah Putih ini berhasil menjadi produsen utama tuna-kaleng dunia. Padahal Thailand tidak punya armada tangkap. Mereka mengimpor bahan baku ikan dari Perancis dan Spanyol, ujar RP Poernomo, Ketua Umum Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN). Menurut dia, 94% bahan baku tuna-kaleng Thailand berasal dari impor, mencapai 723,35 ribu ton. Demi mendukung industri pengalengannya, Thailand mengembangkan industri tuna purse seine yang kemampuannya bahkan mencapai 400 ton dalam sekali proses penangkapan (Indonesia Punya Tuna, Thailand Punya Nama, hlm. 1).

Di pasar Uni Eropa, pasokan tuna-kaleng Thailand mencapai 15%, terbesar kedua setelah Ekuador yang memasok tuna-kaleng sampai 16%. Sementara tuna kaleng Indonesia hanya mengisi sekitar 3% saja. Tak cuma itu, selain masih didominasi produk beku, ekspor produk olahan nasional juga belum bisa memenuhi jaminan keamanan produk yang menjadi persyaratan pasar. Akibatnya, tak sedikit kasus penolakan produk Indonesia di pasar ekspor. Melihat kondisi terakhir yang memprihatinkan, pemerintah pun bertekad mengembangkan industri pengolahan perikanan dalam negeri. Untuk itu dikeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No 17/2007 yang kemudian direvisi dengan Permen No 5/2008.

Permen No 5/2008 pasal 17 dan pasal 70 menyebutkan, ikan hasil tangkapan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan dan juga wajib diolah pada Unit Pengalengan Ikan (UPI) dalam negeri kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi dan ikan lain yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan. Demi mengefektifkan penerapan peraturan tersebut, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)-Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) mengeluarkan keputusan No. 033/DJ-P2HP/2008 tentang jenis ikan laut hasil tangkapan yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.

Agenda penguatan diplomasi sudah merupakan tuntutan tidak saja untuk mewujudkan target-target revitalisasi perikanan, tetapi juga dalam memperkuat posisi perikanan dan kelautan kita di dunia internasional (Arif 2009, hlm. 180-181). Namun, dari upaya-upaya yang dilakukan diatas ekspor tuna ke Thailand dua tahun berturut-turut semakin menurun dari tahun 2008-2011.

I.2 Rumusan Masalah

Terkait latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah yang diangkat adalah ***Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor ikan tuna ke Thailand periode 2008-2011?***

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menjelaskan penyebab penurunan ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand periode 2008 - 2010
- b. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor ikan tuna ke Thailand periode 2008 - 2011

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data di dalam jurusan Hubungan Internasional untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hambatan ekspor ikan tuna yang dapat

dipergunakan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional dalam melengkapi karya tulisnya.

- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekspor ikan tuna ke Thailand terjadi dalam kegiatan ekspor Indonesia ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand.

I.5 Tinjauan Pustaka

Salah satu sumber pendapatan negara yang dapat membantu meningkatkan perekonomian yaitu dengan kegiatan ekspor. Indonesia yang menjadi salah satu dari negara produsen ikan tuna di dunia mampu memproduksi ikan tuna yang dapat bersaing dalam pasar internasional. Negara-negara tujuan utama ekspor ikan tuna Indonesia juga merupakan negara-negara dengan perekonomian yang kuat seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan negara-negara di Asia salah satunya Jepang. Dengan adanya kegiatan ekspor ikan tuna yang dilakukan Indonesia ke negara-negara tujuan utamanya dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan serta cadangan devisa yang mampu membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dalam studi ilmu hubungan internasional, sudah banyak ditemukan pembahasan mengenai kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara Assosiation Southeast Of Asia Nations (ASEAN). Kegiatan kerjasama ekonomi mengenai perdagangan antara Indonesia dengan Thailand juga sudah banyak dibahas terutama mengenai ekspor-impor dalam sektor migas serta kegiatan investasi dibidang otomotif, dan infrastruktur. Namun, belum banyak yang upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor ikan tuna ke Thailand periode 2008 - 2011 serta hambatan yang terjadi dalam kegiatannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang berasal dari hasil beberapa penelitian lain yang sudah pernah diteliti yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian penulis. Beberapa penelitian tersebut dapat membantu penulis untuk mendapatkan sumber informasi lain yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

Adapun penelitian yang memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis buat adalah pertama, dalam karya tulis yang ditulis oleh Deasi Natalia 2012 dengan judul "*Kinerja Daya Saing Produk Perikanan Indonesia Di Pasar Global*" menyatakan bahwa perikanan Indonesia memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dari kedua negara tersebut, khususnya produk-produk perikanan olahan. Sedangkan untuk bahan baku Indonesia memiliki daya saing yang cukup kuat. Bahan baku perikanan yang berkualitas tinggi disatu sisi dan produk perikanan yang berdaya saing rendah disisi lain jelas merupakan permasalahan penting. Ikan merupakan salah satu komoditas perdagangan yang mengalami perkembangan perdagangan cukup pesat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia. Mengapa pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap perkembangan perdagangan ikan? Hal ini disebabkan pertama, jumlah konsumsi ikan dunia, baik ikan segar maupun ikan olahan, sangat besar. Kedua, ikan tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga digunakan untuk bahan baku pakan ternak. Perkembangan perdagangan ikan yang cukup pesat ini juga didorong oleh semakin meluasnya penggunaan lemari pendingin dan pengembangan alat transportasi yang mampu menjaga kualitas ikan segar.

Dari beberapa negara produsen perikanan tangkap, selama periode 2004-2008 hanya Myanmar yang mengalami pertumbuhan di atas 10% per tahun, sedangkan produksi China, Indonesia, India, Rusia, Filipina, Vietnam, Korea dan Meksiko mengalami peningkatan dibawah 10%. Sementara itu, produksi perikanan Peru, Amerika Serikat, Jepang, Chili, dan Thailand mengalami penurunan. Turunnya pertumbuhan produksi di beberapa negara produsen utama tersebut menyebabkan produksi perikanan tangkap dunia mengalami penurunan sebesar sekitar 0,8% per tahun selama periode yang sama. Konsumsi ikan dunia diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan laut per kapita. Data FAO (2001) memperlihatkan bahwa pada 1970 konsumsi ikan laut perkapita adalah 11,5 kg dan meningkat menjadi 12,5 kg pada 1980, dan 14,4 kg pada 1990. Kenaikan ini terus terjadi, sehingga menjadi 16,4 kg pada 2005 dan 17,1 kg pada kurun waktu 2007-2008. Peningkatan

konsumsi tersebut tentu saja memberi peluang bagi setiap negara produsen perikanan untuk dapat meningkatkan pangsa pasar mereka di masa yang akan datang. Bagi Indonesia, hal ini tidak saja menjadi peluang tapi sekaligus tantangan mengingat pesaing tidak saja datang dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Norwegia, Kanada dan negara-negara Uni Eropa tetapi juga dari negara-negara sedang berkembang seperti China, Thailand, Vietnam, dan Peru.

Sebagai salah satu negara produsen perikanan terbesar dunia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, Indonesia juga merupakan salah satu pemain dalam perdagangan komoditas perikanan internasional. Sebagai eksportir, posisi Indonesia tahun 2008 berada pada urutan ke 12, dengan kontribusi terhadap total ekspor komoditas perikanan dunia sebesar sekitar 2,4%. Data FAO (2010) memberikan gambaran bahwa meskipun produksi perikanan tangkap dan budidaya Thailand berada dibawah posisi Indonesia. Apabila melihat kondisi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan pantai yang cukup panjang dibandingkan dengan kedua negara anggota Asean tersebut, seyogyanya Indonesia mampu meningkatkan perannya baik dalam produksi maupun ekspor komoditas perikanan. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan sektor perikananannya, antara lain terjadinya over fishing, masih lemahnya armada tangkap nasional, serta masih maraknya aksi illegal fishing

Perbedaan yang dimiliki jurnal ini dengan pembahasan penulis ialah lebih membahas perkembangan pemasaran tuna dimulai dari tahun 2000-2008, disini tidak membicarakan banyak cara untuk mengatasi cara penanggulangan mengatasi kebijakan peningkatan ekspor gelonggongan terhadap Thailand. Maka penulis akan memperjelas penulisan dalam bahasan nantinya dengan memfokuskan tujuan utama pada upaya yang dilakukan Indonesia berawal dari melihat mutu untuk menanggulangi permintaan gelonggongan yang diminta Thailand.

Dalam ujrunal Wiji Lestari 2013 yang berjudul "*Strategi Peningkatan Daya Saing Tuna Olahan Indonesia di Pasar Internasional*", Menyatakan bahwa sebagian besar produksi ikan tuna Indonesia di ekspor ke beberapa negara tujuan seperti Jepang, Uni Eropa dan Amerika. Permintaan tuna ke ketiga negara ialah pada fresh tuna, tuna frozen. Ekspor tuna olahan memberikan nilai tambah dan

mendorong tumbuhnya industri pengolahan ikan di dalam negeri, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan nilai tambah ekspor ikan tuna. Dukungan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan tuna ini sangat diperlukan, sehingga ekspor tuna olahan akan meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan devisa negara. Nilai ekspor ikan tuna tersebut masih dapat ditingkatkan dengan jalan meningkatkan daya saing produk tuna Indonesia, khususnya tuna olahan.

Untuk meningkatkan daya saing tuna olahan Indonesia dipasar dunia, maka perlu political will pemerintah untuk mendukung industrialisasi tuna, sehingga daya saing tuna dapat ditingkatkan. Guna memberikan gambaran bagaimana daya saing tuna olahan Indonesia di pasar internasional dibandingkan dengan negara-negara pesaing Indonesia dan bagaimana strategi peningkatan daya saing tuna Indonesia, maka dilakukan penelitian. Dapat dirumuskan alternatif-alternatif strategi dalam meningkatkan daya saing industri tuna olahan.

Faktor produksi dan pemasaran sangat diperlukan bagi terjalannya kerjasama bilateral pada ekspor yang dilakukan kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand seperti:

Pertama, meningkatkan mutu tuna Indonesia, Strategi ini perlu segera dilakukan terutama oleh pelaku usaha pengolahan tuna, karena mutu produk olahan tuna akan sangat menentukan penguasaan pasar internasional. Peningkatan mutu perlu dilakukan dari sisi hulu sampai dengan hilir. Penanganan ikan tuna pada saat penangkapan, pasca penangkapan, distribusi/selama transportasi dari pelabuhan ke tempat pengolahan sampai dengan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) perlu dilakukan dengan baik. Thailand yang sudah memelopori dan menguasai pasar internasional dapat dijadikan contoh bagaimana negara tersebut menghasilkan ikan tuna olahan bermutu, Padahal dilihat dari sumber daya, Indonesia memiliki keunggulan komparatif sangat baik. Salah satu faktor daya peningkatan daya saing produk adalah melakukan promosi. Dalam pemasaran diperlukan promosi untuk memperkenalkan dan mengkomunikasikan produk, dengan harapan konsumen dapat membeli produk yang dipromosikan.

Kedua, Mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif. Pemerintah dapat mendorong mengatasi hambatan tarif dan non tarif. Untuk hambatan tarif dapat dilakukan dengan mengadakan lobi-lobi dengan negara eksportir, maupun yang terlibat dalam organisasi bilateral, maupun multilateral. Sebagai contoh, negara-negara yang ter-gabung dalam kelompok *Analysis Critical Control Point* (ACP) dapat fasilitas penurunan tarif yang berlaku di Uni Eropa. Hambatan non tarif menyangkut tentang isu mutu, sanitasi, keamanan pangan, kesehatan, terorisme, isu lingkungan dan hambatan administratif. Untuk mengatasi hambatan non tariff para pelaku harus meningkatkan mutu olahan tunanya, sehingga dapat menembus pasar tujuan. Dalam mengekspor produk ke luar negeri, pembeli dan pemerintah negara importir menerapkan ketentuan impor produk yang ketat dan harus diikuti oleh para produsen.

Jurnal ini menjadikan referensi bagi penulis, karena pada jurnal ini karena menjelaskan bahwa Faktor produksi dan pemasaran sangat diperlukan bagi terjalannya kerjasama bilateral pada ekspor yang dilakukan kedua negara, yaitu Indonesia dan Thailand seperti meningkatkan mutu tuna Indonesia. Dengan melihat tersebut, penulis mencoba meneliti bagaimana Upaya lebih yang harus dilakukan Indonesia dalam meningkatkan ekspor tuna ke Thailand.

Dalam ujrunal Indriana Yudiarosa 2009 yang berjudul "*Analisis Ekspor Ikan Tuna Indonesia*". Menjelaskan mengenai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap ekspor ikan tuna Indonesia dan strategi pemasaran ekspor ikan tuna Indonesia. Indriana menyatakan bahwa Ditinjau dari nilainya, ekspor ikan tuna Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dari harga rata-ratanya (US\$/kg) dapat diketahui bahwa dari tahun 1993 –1997 ikan tuna dalam bentuk segar memiliki harga yang paling tinggi yaitu berkisar antara US\$ 3.7 – US\$ 4.44 , sedangkan ikan tuna kaleng US\$ 2.02 – US\$ 2.94 dan yang paling murah adalah ikan tuna beku dengan harga US\$ 1.23 – US\$ 1.13. Dia juga menyatakan bahwa setiap negara importir memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam mengkonsumsi ikan tuna dan itu akan mempengaruhi harga jual ikan tuna sendiri dan hasil pendugaan fungsi ekspor ikan tuna Indonesia yang menggunakan 2SLS berdasarkan hipotesis.

Indriani juga berargumen bahwa Promosi merupakan salah satu upaya pengenalan produk dan sekaligus sarana untuk membentuk citra produk di hadapan konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan volume penjualan. Promosi melibatkan banyak pihak dan biaya yang cukup tinggi namun itu semua jika dilakukan secara tepat akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Untuk itu, agar volume ekspor meningkat baik dari segi ragam produk ikan tuna maupun jangkauan segmen konsumen yang luas, maka promosi dagangnya bukan sekedar membujuk konsumen tapi lebih mengarah pada memberi keyakinan akan nilai dan manfaat produk ikan tuna Indonesia. Hal ini perlu mendapatkan dukungan dari atase dagang yang mewakili Indonesia baik di negara-negara yang sudah menjadi tujuan ekspor Indonesia, maupun negara lain yang masih terbuka peluangnya untuk dimasuki oleh pasar ekspor ikan tuna Indonesia.

Data diatas menunjukkan bahwa ekspor ikan tuna berhubungan positif dan sangat responsif terhadap perubahan harga ekspor ikan tuna . Selain itu, perlu diperhatikan pula pajak ekspor ikan tuna yang tidak memberatkan produsen namun juga tidak merugikan pemerintah. Nilai tukar rupiah yang berpengaruh negatif terhadap ekspor ikan tuna karena produksi ikan tuna sebagian besar masih menggunakan faktor produksi yang diimpor, sehingga diperlukan upaya pengadaan faktor produksi lokal yang bermutu sama supaya biaya produksi dapat ditekan. Ekspor ikan tuna pada tahun sebelumnya, terutama yang berkenaan ketepatan produk di tangan konsumen baik dari segi harga, mutu maupun waktu sampainya , ketiganya akan berpengaruh terhadap peningkatan produk ikan tuna Indonesia terutama untuk ekspor. Dan Upaya Promosi juga dapat membantu dalam peningkatan ekspor agar negara-negara importir dapat meminati hasil tuna Indonesia. Jurnal ini memiliki perbedaan dengan pembahasan penulis adalah, disini penulis tidak memakai analisis 2SLS Pendugaan Fungsi Ekspor Ikan tuna yang dipakai oleh Indriani dalam karya tulisnya. dan karya tulis Indriani tidak di jelaskan bagaimana kondisi tuna Indonesia sendiri.

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Perdagangan Bilateral

Secara teoritis merupakan suatu bentuk pengembangan dari konsep kawasan (Regionalisme). Regionalisme saat ini bisa dibentuk dalam bentuk pluralism atau bilateral antar dua negara, atau negara satu kelompok kawasan dengan satu negara, atau dengan kelompok kawasan lainnya. Seperti perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Thailand. Dengan menggunakan pendekatan Heckser-Ohlin model, yang menyatakan bahwa *Bilateral Trade Agreement* (BTA) tidak akan menggantikan *Multilateral Trade Agreement* (MTA). Namun kebalikannya, menggunakan pendekatan yang sama dengan *Differential Product*, BTA akan mendukung MTA. *ASIAN Development Bank* (ADB) mencatat jumlah kerja sama di ASIA meningkat pesat yang melibatkan negara anggota ADB dan masih banyak perjanjian bilateral lainnya yang masih di negoisasikan. (Arifin 2004, hlm. 209)

Dalam Perdagangan Indonesia - Thailand disini lebih membahas mengenai ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand. Dimana Indonesia mengekspor ikan tuna yang cukup banyak ke Thailand, namun pada periode 2008-2010 ekspor ikan tuna ke Thailand menurun. Hal ini tidak membuat perdagangan bilateral Indonesia - Thailand renggang, dan hubungan perdagangan bilateral Indonesia - Thailand masih berjalan hingga saat ini.

I.6.2 Teori Kepentingan Ekonomi Nasional

Teori Kepentingan Nasional menurut Daniel S. Papp yang mengatakan bahwa dalam kepentingan nasional terdapat beberapa aspek, seperti ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, moralitas dan legalitas. Dalam hal ini, yang mana faktor ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu Negara selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian negara yang dinilai sebagai suatu kepentingan nasional. Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama perdagangan suatu Negara dalam memperkuat sektor industri, dan sebagainya. (MacMillan Publishing Company 1988, hlm. 29)

Kepentingan ekonomi nasional merupakan turunan dari kepentingan nasional. Ekonomi kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara atau bangsa adalah ekonomi mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan ekonomi serta kesejahteraan.

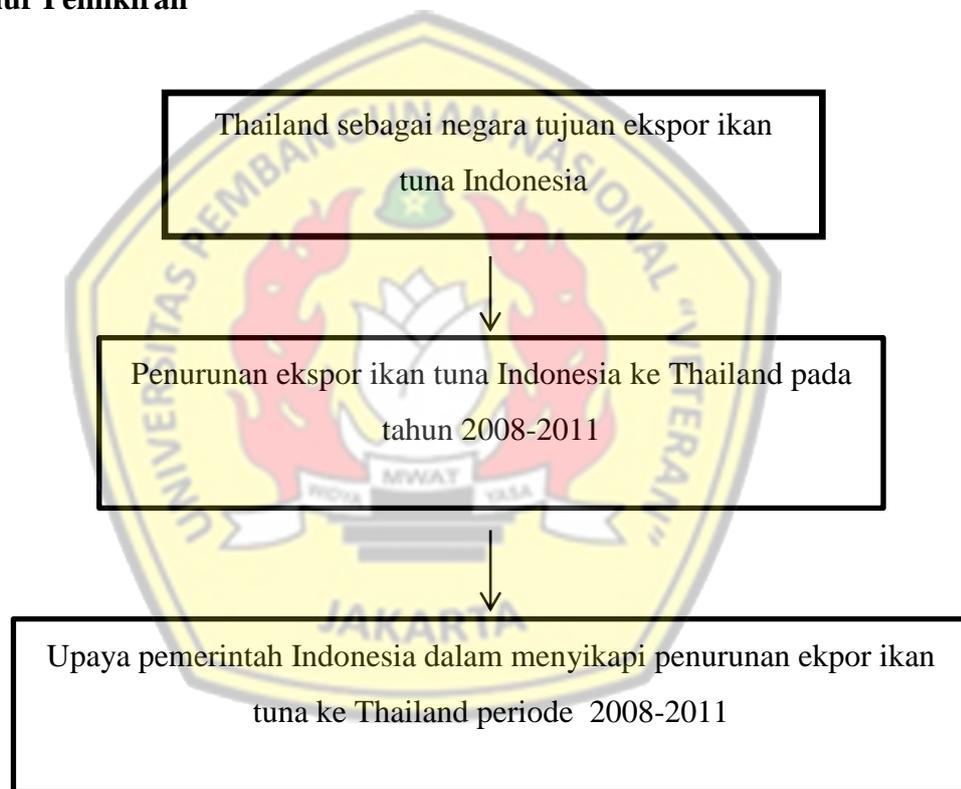
Kepentingan Indonesia dalam hal ekonomi sangat di perjuangkan, karena dalam hal ini rakyat lebih di utamakan dalam kesejahteraannya. Maka dari itu Indonesia terus menerus meningkatkan kerjasama perdagangan ke baik dalam negeri maupun luar negeri terlebih di bidang perikanan dalam hal ekspor ikan tuna ke Thailand. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi perikanan, pertumbuhan produksi perikanan, dan neraca perdagangan ikan nasional akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. kondisi kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan dapat terlihat baik apabila dalam perdagangan yakni ekspor maupun impor itu dapat berjalan dengan baik, disini terlihat apakah Indonesia mampu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi perikanan, pertumbuhan produksi perikanan, dan neraca perdagangan ikan nasional lebih banyak dinikmati para pemodal besar dan asing atau tidak.

I.6.3 Konsep Tuna

Tuna termasuk dalam suku Scombridae, dengan sub-kelompok (tribe) terdiri dari jenis Thunnus dengan 7 spesies, yaitu : madidhang atau tuna sirip kuning (yellowfin tuna, *T. Albacares*); tuna mata besar (bigeye tuna, *Thunnus obesus*); tuna sirip biru selatan (southern bluefin tuna, *T. maccoyii*); albakora (albacore, *T. Alalunga*); tuna abu-abu (longtail tuna, *T. Tonggol*); tuna sirip biru utara (northern bluefin tuna, *T. Thynnus*); tuna sirip hitam (blackfin tuna, *T. Atlanticus*). Dari tujuh jenis tersebut 5 jenis pertama banyak tertangkap di perairan laut Indonesia. Tuna sirip biru utara hanya tertangkap di perairan selatan jepang (Pasifik Utara) yang merupakan tuna berukuran paling besar karena dapat mencapai panjang 304 cm atau pernah tertangkap seberat 679 kg dan jenis ketujuh hanya tertangkap di lautan Atlantik dengan ukuran maksimum yang tertangkap sepanjang 100 cm atau seberat 20 kg.

Dari lima jenis tuna yang tertangkap di perairan Indonesia, ada empat jenis yang merupakan komoditi ekspor utama dari hasil perikanan Indonesia. Tiga jenis pertama merupakan ikan berukuran besar yang dapat mencapai ukuran panjang 200 cm atau seberat 180 kg, sedangkan jenis albakora dan abu-abu hanya dapat mencapai ukuran maksimal 130 cm dengan berat maksimum 40 kg, yang banyak tertangkap berukuran 100-110 cm dengan berat 22-25 kg, sedangkan tuna abu-abu hanya untuk konsumsi lokal, ukuran ikan yang banyak tertangkap berkisar antara 90-110 cm dengan berat 14-23 kg (Bahar 2001, hlm. 8-9).

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini melihat bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor ikan tuna ke Thailand periode 2008-2011. Metodologi dalam sebuah penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

I.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitas, bukan kuantitas untuk dijadikan variable pemahaman. Teknik analisisnya yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang faktual. Kemudian memberikan penjelasan objektif dengan memuat fakta dan data yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan.

I.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari:

- a. *Data Primer* : Laporan tahunan dari Instansi/Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang bersifat kenegaraan dan Wawancara dengan Kementerian Tersebut.
- b. *Data Sekunder*: Bersumber dari website yang berisis dokumen seperti artikel dan jurnal terkait analisis ekspor ikan tuna.

I.8.3 Teknik Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan teori sebagai panduan untuk mengintepretasikan data-data yang telah ada untuk kemudian di saring lagi sehingga mendapatkan data yang bisa digunakan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini.

I.9 Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, model analisis, asumsi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENURUNAN EKSPOR IKAN TUNA INDONESIA KE THAILAND PADA TAHUN 2008-2010

Bab ini akan membahas penurunan ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand pada tahun 2008-2010. Dimulai dari bagaimana potensi ikan tuna Indonesia di pasar Thailand, bagaimana penurunan ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand, membahas dan bagaimana hambatan yang terjadi dalam ekspor ikan tuna Indonesia ke Thailand, serta faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ekspor tuna ke Thailand.

BAB III UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENYIKAPI PENURUNAN EKSPOR IKAN TUNA KE THAILAND PERIODE 2008-2011

Bab ini akan menjelaskan bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menyikapi penurunan ekspor ikan tuna. Bagaimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan serta proses upaya tersebut kepada masyarakat Indonesia sendiri dan pemerintah Thailand.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini sebagai bagian akhir dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP